

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer.
- Azhary, Tahir Muhammad. 2015. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, Cetakan Ke-2. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajar Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fuadi, Munir. 2013. *“Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenamedia.
- Hamzah, Andi. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana Eisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M Yahya. 2009. *Pembahasan Dan Penerapan Kuhap: Penyidikan Dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Atma Pustaka.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Imu Perundang-Undangan Dasar Dan Cara Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jurdi, Faljurrahman. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan Ke-1*. Jakarta: Kencana.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2005. *Hukum Masyarakat Dan Pembangunan*. Bandung: Binacipta.
- Laksana, Gusti I Ngurah Dharma, Dkk. 2017. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Tabanan: Pustaka Ekspresi.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nalle W Immanuel Victor. 2013. *Konsep Uji Materil: Kajian Pembentukan Dan Uji Materil Peraturan Kebijakan Di Indonesia*. Malang: Victory Setara Press.
- Manam, Bagir. 2006. "*Lembaga Kepresiden, UII Press, Yogyakarta*."
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moh Mahmud, MD. 2009. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, Albaini, Muhamad Syukuri, Dkk. 2016. *Hukum Dalam Perspektif Filsafat*. Jakarta: Kencana.
- Patawari. 2019. *Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Edisi I*. Malang: Inteligensi Media
- Rahardjo, Satjipto. 2011. *Dalam Andriaan Bander, Seri Tokoh Hukum Indonesia Satjipto Rahardjo Dan Hukum Progresif Ugeni Dan Kritik: Suatu Pendekatan Elementer Terhadap Negara Hukum*. Jakarta: Episteme Institute.
- Redi, Ahmad. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sholehuddin. 2003. *System Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja.
- Sri, Mamudji, Soerjono. 2001. *Penelitian Hukum Normative*. Jakarta: Grafindo Persada.

Tjandra, W Wriawan. 2013. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Npt Gramedia Widisarana.

Veld, J. In't. Dkk. 2016. *Pembatasan Konstitusional Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Berdasarkan Uud 1945*. Mataram: Pustaka Bangsa.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas System Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 6485).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2020. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia).

Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Plaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Isease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**JURNAL**

- Amalia, Dkk. 2020. "Telaah Polemik Pembatasan Sosial Berskala Besar Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Muhakkamah*. Volume 5. Nomor 1.
- Firdaus Aras, Rudy Hendra Pakpahan. 2020. Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19. Volume 30. Nomor 2.
- Astini Suni, Ni Komang. 2020. "Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pembelajaran Tingkat Sekolah Pada Masa Pandemi Covid-19". Volume 11. Nomor 2.
- Hairi, Jaya Prianter. 2020. "Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19". Volume 12. Nomor 7.
- Hasrul, Muh. 2020. "Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 Covid-19". Volume 3 Nomor 2.
- Hikmawati, Puteri. 2016. "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Bersyarat Menuju Keadilan Restorative". *Jurnal Negara Hukum*. Volume 7. Nomor 1.
- Islamy, Athoillah, Dkk. 2020. "Problem Efektifitas Pencegahan Covid-9 Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum" (Studi Analisis Kebijakan PSBB). Volume 6. Nomor 2.
- Novira Nina, Rofi Iskandar, Rehunul Bahren. 2020. "Presepsi Masyarakat Akan Pentingnya Social Distancing Dalam Penanganan Wabah Covid-19 Di Indonesia". *Jurnal Kependudukan Indonesia*. Volume 1. Nomor 1.
- Ralang, Hartati Syafrid. 2020. "Bersama Relawan Virus Covid-19 Indonesia". *Jurnal Sosial Budaya*. Volume 7. Nomor 6.

- Rahmawati Lely Marita, Dkk. 2021. “Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020”. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Volume 27. Nomor 6.
- Ristyawati, Aprista. 2020. “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD RI 1945”. Volume 3. Nomor 2.
- Sari, Ariella Gita, dkk. 2020. “Kebijakan Pemberlakuan Karantina Wilayah Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan”. *Jurnal Transparasi Hukum..* Volume 8. Nomor 1.
- Santiago, Faisal. 2017. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum”. *Pagaruyung Law Jurnal*. Volume 1, Nomor 1.
- Sibuea, Haris Y. P. 2016. “Teori Efektifitas Hukum Dalam Pencegahan Hukum Pengaturan Minuman Berakhol”. *Negara Hukum*. Volume 7. Nomor 1.
- Suardana, I Wayan, Dkk. 2020. “Keabsahan Penerapan Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan Si Wilayah Yang Tidak Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar”. *Jurnal Kertha Semaya*. Volume.8. Nomor 9. Halaman 14.
- Subyakto. Kuku. 2015. “Asas Ultimum Remedium Ataukah Asas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume 2. Nomor 2.

Sukur, Moch Halim. 2020. “Penanganan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan”. *Journal Incio Legis*. Volume 1 Nomor 1.

Supriatna, Eman. 2020, “Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Sosial Dan Budaya*. Volume 7. Nomor 6.

Sonata, Depri Liber. 2014. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum”. *Jurnal Hukum*. Volume 8. Nomor 1.

Usman. 2018. “ Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 6. Nomor 2.

Wardhana. Budhhi Suria. 2020. “Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Ilmu Kepolisian*. Volume 4. Nomor 2.

Wijayanti, Winda. 2013. “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat “. *Jurnal Konstitusi*. Volume 10. Nomor 1.

## **INTERNET**

Madiuntoday. *Cegah Penularan Covid-19 Laksanakan 3 M Dengan Benar*. Diakses Melalui <https://madiuntoday.id.2020/10/05/cegah-penularan-covid-19-laksanakan-3m-dengan-besar/>. Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 29 Oktober 2020.

Kompas.Com. *Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah*. Diakses Melalui <https://www.google.Co.id/amps/amp.kompas.com/nasional/read/2020/04/01/11054771/pembata>

san-sosial-berskala-besar-berhak-batasi-orang-keluar-masuk-suatu-daerah.

Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 29 Oktober 2020.

Kompas.Com. *Cuci Tangan Untuk Mencegah Virus Corona, Perlu Pakai Sabun*

*Tertentu.*

Diakses

Melalui

[https://www.google.co.id/amps/s/smp.kompas.com/sains/read/2020/03/18/0](https://www.google.co.id/amps/s/smp.kompas.com/sains/read/2020/03/18/080700123/cuci-tangan-untuk-mencegah-virus-corona-perlukah-pakai-sabun-tertentu-)

[80700123/cuci-tangan-untuk-mencegah-virus-corona-perlukah-pakai-](https://www.google.co.id/amps/s/smp.kompas.com/sains/read/2020/03/18/080700123/cuci-tangan-untuk-mencegah-virus-corona-perlukah-pakai-sabun-tertentu-)

[sabun-tertentu-](https://www.google.co.id/amps/s/smp.kompas.com/sains/read/2020/03/18/080700123/cuci-tangan-untuk-mencegah-virus-corona-perlukah-pakai-sabun-tertentu-). Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 29 Oktober 2020.

Sjarif. Ahmad Fitriani. 2020. *PP Inikah Yang Kita Harapkan Untuk Menangani*

*Covid-19 Di Indonesia.* Diakses Melalui <https://m.hukum>

[online.com/berita/baca/it5e85a1602bad/pp-inikah-yang-kita-harapkan-](https://m.hukumonline.com/berita/baca/it5e85a1602bad/pp-inikah-yang-kita-harapkan-untuk-menangani-covid-19-di-indonesia-oleh-fitriani-ahlan-sjarif/)

[untuk-menangani-covid-19-di-indonesia-oleh fitriani-ahlan-sjarif/](https://m.hukumonline.com/berita/baca/it5e85a1602bad/pp-inikah-yang-kita-harapkan-untuk-menangani-covid-19-di-indonesia-oleh-fitriani-ahlan-sjarif/). Diakses

Pada Hari Jumat, Tanggal 30 Oktober 2020.

Setiawan, Parta. 2020. “Pengeretian Virus”. Diakses Melalui <https://www.guru>

[pendidikan.co.id/virus/](https://www.gurupendidikan.co.id/virus/). Diakses Pada Kamis, 29 Oktober 2020.

Siregar, Sarah Nuraini. 2020. *Polri Di Masa Pandemi Covid-19 Kompleksitas*

*Masalah Penegakan Hukum Dan Pilihan Solusi Politik Nasional.* Diakses

Melalui <https://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2> politik-

[nasional/1391-polri-di-masa-pandemi-covid-19-kompleksitas-masalah-](https://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2)

[penegakan-hukum-dan-pilihan-solusi](https://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2). Diakses Pada Kamis 21 Januari 2020.

Renaldo, Hendi. Artikel OMBUDSMAN.2020. *Bantuan pemerintah di mass Covid-*

*19.* Diakses melalui [https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel—bantuan-](https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel—bantuan-pemerintah-di-masa-covid-19)

[pemerintah-di-masa-covid-19](https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel—bantuan-pemerintah-di-masa-covid-19). Diakses Pada Sabtu 23 Januari 2020.

Tim FH. Universitas Jambi. Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelanggar PSBB. Diakses Melalui <https://law.unja.ac.id/sanksi-pidana-penjara-terhadap-pelanggar-psbb>. Diakses Pada Jumat, 22 Januari 2021

